eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565
JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 1 (2021) pp. 68-80

http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/9016
DOI: 10.33474/jisop.v3i1.9016

Konstruksi Realitas Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberitaan Media *Online*

Rezzi Nanda Barizki[1]*, Mayang Riyantie[2]
[1]Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Jakarta, Indonesia, email: rezzinandabz@yahoo.com
[2]Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Jakarta, Indonesia, email: namanya.mayang@gmail.com
*Koresponden Penulis

Info Artikel

Submit: 17 Okt 2020
Accepted: 14 Mar 2021
Publish: 26 Mar 2021

Keywords:
News construction; KPK Integrity; Kompas.Com; Detik.Com

Kata Kunci:
Konstruksi Berita; Integritas KPK; Kompas.Com; Detik.Com

Lisensi: cc-by-sa

Abstract

The aim of this research is to know the construction of the reality of the reporting on the integrity of the KPK from the framing of online media Kompas.com and Detik.com. The paradigm used is constructivist, with the Entman's framing analysis method, which means that it is preceded by the assumption that reality tends to have multiple faces (multiple reality). Therefore, this research will have a theoretical contribution to the public's understanding about the construction of mass media reality, and public awareness that the aspects of corruption prevention must be started by the actors of KPK itself (the issue of integrity), as well as for strengthening the anti-graft institution. The results showed that the reality construction formed by excellent reputation media such as Kompas.com and Detik.com will gain high public trust, especially in disclosing information on important state institutions, such as KPK. The similarity construction is related to the public criticism and demand about the existence of KPK as Supervisory Board; on the contrary, it oftentimes still stained by the violation allegation of the ethical code of its leaders. Moreover, there was internal conflict, decreased performance and public pessimism. As for the difference, Kompas.com built a positive image by the KPK's actions in overseeing state institutions and investigating several cases, while Detik.com delivered content on sympathetic social action, coordination with regional leaders, appreciation for the existence of KPK by a popular state figure.

Abstrak

Tujuan penelitian ingin mengetahui konstruksi realitas pemberitaan integritas KPK hasil pembingkaian media online Kompas.com dan Detik.com. Paradigma yang digunakan konstruktivis, dengan metode analisis framing model Robert N. Entman, yang berarti didahului dengan asumsi bahwa realitas cenderung berwajah ganda (multiple reality). Oleh karena itu, penelitian ini akan memiliki kontribusi teoritis terhadap pemahaman publik mengenai konstruksi realitas media massa, dan penyadaran pada publik bahwa aspek pencegahan korupsi harus diawali dari para aktor yang ada di dalam KPK sendiri (isu integritas), sekaligus penguatan lembaga antirasuah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kontruksi realitas bentukan media sekaliber Kompas.com dan Detik.com akan memperoleh kepercayaan publik yang tinggi, terutama dalam mengungkap informasi lembaga-lembaga penting negara, seperti KPK. Kesamaan konstruksi berkaitan dengan adanya kritik dan tuntutan publik terhadap Dewan Pengawas KPK mengenai dugaan pelanggaran kode etik salah satu pimpinan. Selain itu adanya konflik internal, turunnya

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

kinerja dan pesimisme publik. Adapun perbedaannya, Kompas.com membangun citra positif dari aksi KPK dalam mengawasi institusi negara dan pengusutan beberapa kasus, sedangkan Detik.com menyampaikan konten aksi sosial simpatik, koordinasi dengan pemimpin daerah, ungkapan apresiatif terhadap aksi KPK dari tokoh negara populer.

PENDAHULUAN

Persoalan integritas muncul bersamaan dengan perkembangan politik dunia yang ditandai adanya gelombang demokrasi sejak era 1980an. Indonesia sejak 1998 dan negara-negara Arab sejak awal 2011, mengalami gelombang reformasi, yang kini justru sebagian publik mempertanyakan tingkat keberhasilannya. Sejalan dengan hal itu, tuntutan publik di masing-masing negara mengenai terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) terus meningkat, bahkan terus berkembang pada isu tiga karakter: integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks Indonesia, telah lama publik dan aktivis antikorupsi berbicara tentang urgensi penguatan integritas pejabat publik dalam berbagai tingkatan pencegahannya. Tampaknya, penguatan integritas itu tidak terjadi. Meski tidak jarang mereka dilantik dengan menandatangani 'Pakta Integritas' namun masih saja tertangkap tangan atau masih melakukan praktik-praktik korupsi (Azra, 2017; Sumaryati, 2020).

Terkait aktualitas dan kebaruan berita penguatan integritas KPK dalam framing pencegahan korupsi, meskipun masih dianggap masih sangat subyektif, mengingat akar pemilihan berita bergantung pada ideologi, misi dan visi bahkan nilai yang ingin disampaikan oleh media pemilik kuasa pemberitaan, keberadaan media online sebagai bagian dari penyedia informasi masih memiliki trust tinggi dalam memenuhi ekspektasi publik, terutama dalam menjalankan fungsi "pengawasan". Hal ini tercermin dari tingkat popularitas Kompas.Com dan Detik.Com.

Berdasarkan laman beberapa media *online* yang peneliti himpun, mengenai daftar situs berita online terpopuler sampai dengan akhir Juni 2020, didapatkan urutan yang memosisikan Kompas.Com dan Detik.Com selalu pada urutan 2 (dua) teratas. Setidaknya sohibsanam.com, centerklik.com dan www.it-jurnal.com menyajikan data yang sama. Agak berbeda dengan ketiga laman tersebut, berdasarkan olah data romeltea.com tanggal 23 Juni 2020, menempatkan Kompas.Com dan Detik.Com pada urutan 4 (empat) dan 3 (tiga), bukan pada 2 (dua) teratas, tetapi tidak menggeser reputasi keduanya sebagai yang teratas. Juditha (2013) bahkan menyatakan bahwa pelopor media *online* pertama yang ada di Indonesia adalah situs berita Detiknews.com. Dalam Alexa.com, dinyatakan bahwa di antara 10 situs berita paling populer di Indonesia, Detiknews.com menduduki urutan pertama sebagai situs paling populer dan paling banyak dikunjungi. Inilah alasan pemilihan dua media online tersebut sebagai objek kajian dalam penelitian ini.

Di sisi lain, dalam dunia media massa, realitas harus diakui sebagai hasil konstruksi (Astuti, 2016). Oleh karena itu, menjadi sulit mencari realitas yang sebenar-benarnya. Media massa sangat berkuasa memproduksi pembingkaian realitas dalam konten-konten pemberitaannya. Adapun reputasi media pengonstruksi sangat berpengaruh terhadap pengakuan publik atau khalayak pembacanya (Adnjani, 2009). Maksudnya, hasil kontruksi realitas dalam bentuk kemasan pemberitaan media sekaliber Kompas.com dan Detik.com akan memperoleh *trust* publik yang tinggi, terutama dalam mengungkap informasi lembaga-lembaga penting negara, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Secara umum, komisi yang kehadirannya dianggap *hero* itu seringkali ditunjukkan prestasi-prestasinya, seperti pengungkapan kasus penyimpangan, persekongkolan pengadaan barang dan jasa, persekongkolan berjamaah serta isu-isu praktik suap dan

(cc) BY-SA
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

gratifikasi dalam penggelembungan anggaran, diikuti penindakan tegas dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) di berbagai daerah.

Kompas.com dan Detik.com tidak hanya menyajikan pemberitaan-pemberitaan sejenis, tetapi juga diferensiasi perspektif, yakni aspek kritis mengenai integritas anggota KPK, sebagai antitesis dari permasalahan korupsi yang tidak banyak disampaikan pada publik. Aspek diferensiasi dan reputasi tersebut yang menarik perhatian peneliti untuk memilih topik konstruksi realitas media online Kompas.com dan Detik.com pada penelitian ini.

Lingkup penelitian terbatas pada pemilihan konten berita secara subjektif oleh peneliti, sehingga ada kemungkinan terdapat konten berita sejenis tidak terseleksi sebagai objek analisis. Periode pemberitaan yang dipilih adalah Januari sampai dengan Juni 2020, yang dimungkinkan terdapat pemberitaan minor tentang integritas KPK, dibandingkan berita prestasi KPK dalam penangkapan, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang didapat, hanya berdasarkan pemahaman peneliti pada periode yang dimaksud.

Adapun urgensi penelitian antara lain adalah pemahaman mengenai konstruksi sosial media massa atau konstruksi realitas media massa sebagai konsekuensi ideologi, visi, misi dan kuasa media yang bersangkutan. Selanjutnya sebagai penyadaran terhadap antisipasi pencegahan pemberantasan korupsi, yang harus diawali dengan integritas tinggi para anggota KPK sebagai representasi lembaga. Selain itu, dapat pula sebagai pengembangan teori konstruksi sosial atas realitas menjadi konstruksi realitas media massa. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui konstruksi realitas integritas KPK dalam pemberitaan media online Kompas.com dan Detik.com pada periode pemberitaan Januari sampai dengan Juni 2020 berdasarkan hasil framing model Entman.

Berger & Luckmann (1990) berpandangan bahwa kenyataan dibangun secara sosial. Individu-individu membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak terpisahkan dengan masyarakatnya. Sedangkan Waters dalam Sukidin, (2002) mengatakan bahwa "they start from the premise that human beings construct sosial reality in which subjectives process can become objectivied". Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa manusia memulai pemahaman dunia sosial dengan mengonstruksi realitas melalui proses subjektivitas menjadi objektivitas. Dasar pemikiran inilah yang mendasari lahirnya teori sosiologi kontemporer "konstruksi sosial".

Dalam konstruksi sosial, manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi manusia melalui proses internalisasi. Dalam konsep berpikir dialektis (tesis-antitesis-sintesis), Berger & Luckmann (1990) memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Proses dialektis itu mencakup tiga momen simultan, yaitu: eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi), internalisasi (individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya). Selanjutnya tercipta objektivasi, sebuah kenyataan yang berada di luar diri manusia, yang keberadaannya dalam keterpisahan (Bungin, 2006).

Dengan demikian, hubungan antara individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika (intersubjektif) yang diekspre-sikan dengan tiga momentum: society is human product. Society is an objective reality. *Human is social product* (Berger & Luckmann, 1990). Teori ini kemudian dikembangkan oleh Bungin (2006) sebagai "konstruksi realitas media massa" sebagai berikut:

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

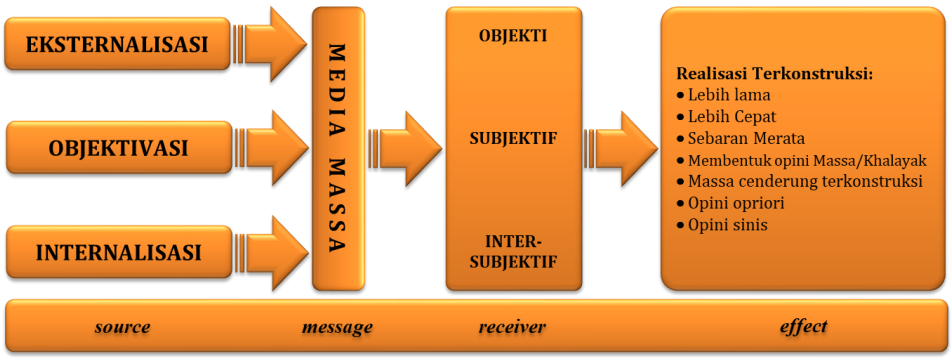

Gambar 1. Konstruksi Sosial Media Massa
(Sumber: disederhanakan peneliti dari Bungin, 2006)

Dalam menyiapkan materi konstruksi, terdapat tiga jenis keberpihakan media massa, yakni keberpihakan kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Adapun tahapan konstruksi secara umum terdiri dari: 1) tahapan sebaran konstruksi, meskipun konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing berbeda, namun prinsip utamanya adalah real time; 2) tahap pembentukan konstruksi. Tahapan ini memiliki efek: pertama, konstruksi realitas pembenaran; kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu menjadi pembaca dan pemirsa karena pilihannya, kemudian "bersedia" pikirannya dikonstruksi media; ketiga, menjadikan konsumsi media untuk pilihan konsumtif. 3) Tahap pembentukan konstruksi citra, dan 4) tahap konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akunbilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi.

METODE

Sesuai dengan kaidah analisis isi kualitatif, langkah awal penelitian dilakukan dengan memilih model analisis, yang kemudian digunakan framing (Entman, 1993). Model ini peneliti anggap paling sesuai untuk memperdalam pemahaman mengenai isi produk media, karena secara sederhana dapat mengidentifikasi konteks sosial/realitas yang terjadi sewaktu konten dan pesan dibuat.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan proses seleksi purposive berita Kompas.Com dan Detik.Com. Seleksi data didasarkan atas pertimbangan konten menyinggung integritas anggota KPK, atau representasi lembaga KPK dalam kurun waktu pemberitaan bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Inilah yang peneliti jadikan sebagai data primer.

Setelah melalui proses reduksi dan klasifikasi data, maka penyajian data berdasarkan framing Entman diinterpretasikan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan, mengacu pada teori-teori yang relevan mengenai proses konstruksi realitas ataupun hasil penelitian terdahulu, yang isinya terdapat relevansi dengan penguatan integritas KPK. Teknik pengumpulan data semacam ini didasarkan atas kaidah penggunaan literatur-literatur ilmiah seperti dinyatakan oleh Sugiyono (2012). Sebagai pengayaan, digunakan pula studi dokumentasi, yakni berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya (Arikunto, 2010). Dalam hal ini, studi dokumentasi primer diutamakan pada konten pemberitaan media online.

Pada tahapan interpretasi data, sampai pada pencapaian kesimpulan, model yang digunakan adalah elaborasi dari model framing Entman (1993) dan konstruksi realitas media *online* berdasarkan konsep konstruksi realitas Berger & Luckmann (1990) Ilustrasinya sebagai berikut:

(cc) BY-SA
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Gambar 2. Model Analisis Entman
(sumber: Mulyana & Eriyanto, 2002)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Framing *Kompas.Com*

Secara umum pemberitaan KPK di media ini secara urut dari yang terbaru, yakni sekitar Juni 2020 mundur sampai Januari 2020 terdapat konten yang berkisar pada persoalan: 1) fasilitas negara (gaji dan tunjangan) anggota KPK, yang tentunya cukup besar dengan harapan bahwa pemberantasan korupsi dapat diselesaikan lebih efektif. 2) Konflik internal (mundurnya sejumlah anggota), adanya fenomena ketidakpuasan antarunit kerja serta penerapan kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh sebagian anggota berdampak pada pelemahan lembaga. 3) Produktivitas penanganan perkara atau tangkap tangan menurun, diikuti oleh kapasitas pengawasan yang belum optimal (peran KPK dalam menindaklanjuti indikasi korupsi di sejumlah institusi serta pengusutan perkaranya. 4) Pelanggaran kode etik. Salah satu pimpinan KPK mengundang kontroversial karena berlebihan menggunakan fasilitas pihak swasta dalam melakukan tugas. Dikhawatirkan hal semacam ini dapat menghambat objektivitas dan netralitas. 5) Pemberhentian sejumlah kasus. Publik menyoroti adanya indikasi pengabaian sejumlah kasus, sehingga meningkatkan eskalasi isu *tebang pilih*. 6) Konstruksi UU yang mengundang banyak kekawatiran publik mengenai pelemahan peran KPK, diikuti oleh beberapa momentum ketika KPK melakukan pelimpahan kasus kepada lembaga hukum lain. 7) Minimnya penangkapan (OTT). Pemberitaan ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada upaya sistematis dari para pemangku kepentingan, dala melemahkan peran KPK.

Dilihat secara umum, mayoritas berita memang terkesan tidak memperkuat lembaga KPK, apalagi dalam persoalan integritas. Secara konten, *Kompas.Com* lebih banyak menunjukkan adanya pelanggaran kode etik dan konflik internal yang

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

berakibat pada pesimisme pengusutan kasus-kasus korupsi di masa yang akan datang. Baik dari internal dan eksternal organisasi, KPK seperti dirundung banyak masalah. Secara tersirat seakan ada banyak aktor misterius di luar KPK yang memang sengaja membuat kondisi ini berlangsung dan misi tersebut sepertinya sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Keberhasilannya adalah lemahnya KPK dan tidak ada lagi hiruk pikuk tertangkapnya pejabat publik yang selalu menjadi sensasi berita.

Di lain pihak, terdapat pemberitaan yang berefek destruktif bagi KPK, yakni persoalan perilaku salah satu pimpinan yang dianggap melanggar kode etik dengan menggunakan fasilitas transportasi mewah untuk sebuah urusan. Inilah berita sentral yang demikian banyak dibahas dan tokoh ini pula yang menjadi indikator tentang kinerja KPK. Seakan tokoh ini yang merepresentasikan keseluruhan perilaku KPK.

Dari tokoh ini, melahirkan berbagai tudingan negatif bahwa *track record* KPK sama dengan *track record* tokoh pimpinan ini. Yang terjadi kemudian. Publik hanya melihat KPK dari segala aktivitas tokoh ini. Dengan demikian, penguatan KPK seakan tidak sinkron dengan konstruksi pemberitaan.

Melalui komentar-komentar tokoh ini pula, banyak respon dari berbagai kalangan, bahwa KPK memang sudah tidak menjadi *hero* lagi. Kepercayaan diri tokoh ini dalam menanggapi secara cepat kritikan publik mengindikasikan bahwa tokoh ini bukan tokoh yang berusaha menaikkan simpatik publik. Ada kesan bahwa tokoh ini adalah sosok yang tidak peduli dengan opini publik.

Di balik semua pemberitaan yang menegasikan penguatan integritas, terdapat upaya-upaya konstruktif pemberitaan yang menjadi penyeimbang kritik publik yang terus berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh KPK dalam melakukan pengawasan atau semacam *warning* adanya indikasi korupsi yang sedang dipelajari dan ditelusuri secara seksama. Sayangnya pemberitaan ini tidak sensasional. Apa yang menjadi tugas formal memang selalu tidak sensasional. Mungkin ada niat positif dari pemberitaan ini untuk menunjukkan eksistensi KPK, tetapi tanpa disadari bahwa berita-berita formal ini semacam ini justru menambah pesimisme publik. Sebuah konsekuensi wajar tentunya jika mengingat wacana budaya korupsi pejabat dan pimpinan daerah yang terus mengkawatirkan tetapi jumlah tangkap tangan justru menurun.

Kompas.com seakan ingin melengkapi analisis publik terhadap kinerja KPK dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan beberapa tanda awal atau benih-benih awal yang tidak lagi mengagetkan. Kondisi ini merupakan efek kausalitas dari konstruksi UU tentang KPK yang kontroversial. Yang kemudian berkembang adalah tidak adanya efek keterwakilan rakyat pada DPR. Artinya, suara rakyat yang tidak menyetujui konstruksi UU yang baru, tetapi DPR menyetujuinya. Akibatnya apa yang terjadi pada KPK saat ini menjadi hal yang sudah diprediksi oleh publik. Jadi, penyelesaian yang ditawarkan oleh *Kompas.com* melalui *framing* pemberitaan dari Januari sampai Juni 2020 merupakan upaya penyadaran publik bahwa KPK memang sedang mengalami pelemahan yang ditandai dengan turunnya kinerja dan integritas para pemimpinnya.

Sepintas, hal ini negatif, tetapi fungsi media yang harus menyampaikan fakta, terdapat unsur edukasi dan literasi juga. Publik harus melihat KPK dulu dan sekarang dalam bingkai realita bukan citra. Dengan demikian, bingkai berita *Kompas.com* justru menjadi hal yang meningkatkan kontrol publik terhadap peran KPK: "*Bukan saat ini saja KPK menghadapi pelemahan. Beberapa tahun lalu, KPK juga pernah mengalami hal sama setelah penangkapan pejabat mulai dari DPR hingga pemerintah. Dengan penguatan jejaring, KPK akhirnya dipercaya lagi*" (Sulistio, 2020).

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Jika disimak lebih dalam, *positioning Kompas.com* yang selalu berada pada peringkat atas paling diminati, tidak luput dari sisi ini. Rakyat ingin mengetahui realita yang sebenarnya apalagi menyangkut lembaga yang sangat favorit seperti KPK. Bagaimanapun, kemasan berita *Kompas.com* juga menawarkan solusi, bahwa peran publik tetap signifikan dalam melakukan pengawasan. Hal ini ditunjukkan oleh *Kompas* dengan data-data personal mengenai gaji yang sesungguhnya tidak populer. Dari sisi sensasi hal ini tidak positif, justru kisaran jumlah uang yang ditunjukkan akan menambah pesimisme publik yang dalam kondisi terakhir banyak menemui kesulitan perkembangan: Di sisi lain, *Kompas* ingin mengajak publik untuk berperan lebih dalam penguatan KPK. Bagaimanapun, KPK dibiayai oleh anggaran negara yang berasal dari rakyat, sehingga rakyat juga berhak mengetahui berapa besar perhatian negara atau pemerintah terhadap KPK. Di satu sisi, akan berdampak pada profesionalitas KPK, di sisi lain akan berdampak pada legitimasi KPK. Inilah konstruksi berita tentang kisaran gaji para pimpinan KPK.

Pada sisi lain, menghubungkan konstruksi realitas dengan realitas sesungguhnya tetap menyisakan tanda tanya dengan sebuah jawaban bahwa konstruksi adalah konstruksi. Artinya konstruksi hanyalah merupakan *setting* media dalam membangun bahasa-bahasa kebenaran konstruktif, bukan kebenaran *an sich*. (Sitompul, 2014) dalam "Konstruksi Realitas Peran KPK dalam Pemberitaan *Online* Terkait Kasus Korupsi (Studi Framing Beberapa Pemberitaan *Online* Terkait Peran KPK pada Kasus Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah", dapat dilihat dua konstruksi utama dalam tiga berita *online*. *Pertama*, konstruksi militansi KPK, peran KPK sebagai oposisi terhadap kekuatan penguasa atau pemerintah yang bergerak tidak hanya pada nilai proses hukum tetapi juga pada nilai-nilai universal demokrasi. *Kedua*, konstruksi KPK sebagai organisasi anti elitis. Ini merupakan konstruksi peran KPK sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi, yang memang merupakan perilaku elit. *Ketiga*, secara praktis bahwa media sebaiknya memberikan pemberitaan yang mendukung kebenaran. Jadi, kecenderungan pemberitaan tentang eksistensi KPK sebagai "musuh penguasa" menjadi senjata pembangun simpati publik, namun pada akhirnya terdapat semacam keresahan bahwa media massa memiliki potensi tidak mendukung kebenaran, tetapi hanya mengonstruksi kebenaran.

2. Framing *Detik.Com*

Jika dibandingkan dengan *Kompas.com*, media ini cenderung lebih lunak bahkan dukungan terhadap integritas KPK lebih baik, dilihat dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Adapun konten pemberitaan KPK secara umum antara lain: 1) kritik terhadap salah satu pimpinan KPK (dugaan penyalahgunaan kode etik) yang diikuti oleh pemberitaan klarifikasi dari yang bersangkutan, sehingga antipati publik dapat berkurang. 2) Adanya aksi sosial simpatik KPK (berkaitan dengan momentum Covid-19) sebagai strategi kampanye simpatik yang momentumnya memang tepat. 3) Kemitraan politik dengan pemimpin daerah. Terbangun kesan bahwa perencanaan pencegahan korupsi demikian menonjol. 4) Peran Dewan Pengawas KPK terhadap pimpinan KPK (kritik publik terhadap Dewas) yang diterima oleh para pimpinan kolektif KPK dengan pernyataan-pernyataan amanah. 5) Produktivitas rendah (jarangnya OTT) tetap diberitakan, tetapi diikuti oleh alasan pembelaan diri dari salah satu tokoh KPK bahwa hal tersebut justru menjadi tanda bahwa KPK tidak bekerja atas dasar tekanan pihak tertentu. 6) Pesimisme publik dimuat juga, namun diikuti oleh opini-opini konstruktif sebagai *counter attack*nya. 8) Kritik terhadap konflik internal berlarut-larut tetap ada, namun diikuti oleh adanya apresiasi kinerja dari tokoh

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

penting, sehingga terbangun kesan bahwa konflik yang dimaksud justru mengarah pada perbaikan lembaga. Demikian pula ada konten kritis mengenai transparansi yang diikuti oleh argumen pimpinan KPK tentang legitimasi praktik transparansi dalam tindakan yang dilakukan.

Jadi, media yang satu ini melihat konflik internal KPK tidak hanya terjadi pada lapisan pimpinan dan anak buahnya, tetapi lembaga tertinggi dalam KPK pun dianggap bermasalah. Hal ini ditunjukkan dari pemberitaan tentang integritas Dewan Pengawas yang juga mengundang pesimisme publik. Bahkan *Detik* membahas konflik yang berlarut-larut ini secara lebih detil dibanding *Kompas*.

Representasi integritas KPK juga ditunjukkan oleh *Detik* melalui perilaku salah satu pimpinan yang melanggar kode etik, meskipun yang bersangkutan kemudian juga cukup berhasil menjawab alasan pelanggaran kode etik yang dituduhkan. Pemberitaan tentang tanggapan tokoh yang dimaksud cukup berhasil menaikkan citra lembaga KPK untuk tidak mengundang efek domino kritikan lebih lanjut. Namun demikian, citra pimpinan ini kemudian banyak diikuti masa lalu bahkan data menurunnya kinerja KPK sejak tokoh ini menjadi dilantik menjadi pimpinan. Dengan kata lain, tokoh ini seakan menjadi tolak ukur salah satu penyebab penurunan kinerja KPK. Jadi, integritas KPK memang makin menemukan afirmasinya dari hari ke hari, sayangnya dalam citra yang makin membuat pesimisme publik juga berkembang.

Konstruksi pencitraan KPK dalam *Detik* cukup positif dengan memanfaatkan momentum pandemi Covid-19. Meskipun tidak signifikan, kampanye humas ini cukup mampu mengimbangi deretan pemberitaan tentang lemahnya integritas para pimpinan KPK. Terlebih lagi juga liputan tentang koordinasi KPK dengan para pemimpin daerah, seakan KPK saat ini memiliki konsep pencegahan yang lebih baik dibanding pendahulunya. Konsep koordinatif yang ditunjukkan secara terbuka ini memang tidak banyak diekspos pada KPK sebelumnya, sehingga peliputan *warning* ini cukup positif.

> *Lili (Wakil Ketua KPK) Lili Pintauli Siregar Sic! mengatakan pembagian masker itu merupakan bentuk kepedulian KPK. Sebab, kata dia, salah satu nilai antikorupsi adalah peduli. "Iya, karena kan salah satu nilai antikorupsi itu kan peduli. Jadi ini antivirus sama dengan peduli kepada kesehatan masyarakat dan itu bagian dari nilai-nilai antikorupsi*," katanya (Ilman, 2020).

Dibanding *Kompas*, *Detik* justru lebih panjang memuat pemberitaan tentang peran Dewas dalam meningkatkan integritas para anggotanya. Hal ini ditunjukkan oleh historisitas kasus pelanggaran kode etik pimpinan yang kerap tidak berujung pada keputusan tegas. Jadi, berdasarkan banyak kritik dari publik, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewas hanya sebagai pemenuhan struktural organisasi saja tanpa dapat ditunjukkan realita peran yang mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Satu hal yang tidak banyak diberitakan oleh media lain, dengan efek penonjolan yang lebih intensif adalah apresiasi peran KPK oleh seorang tokoh nasional dari BIN (Badan Intelijen Negara). Seakan mampu *menyapu bersih* pesimisme publik tentang pelemahan dan penurunan integritas para pimpinan KPK, apa yang ditunjukkan *Detik* sangat signifikan mendongkrak citra KPK yang lebih *smooth* dalam melakukan penindakan. Jadi, semacam ada perubahan strategi dari KPK yang baru. Hal ini pula yang kemudian menutup justifikasi publik tentang kapabilitas KPK dalam menangani perkara. Pemberitaan mengenai sejumlah kasus pada Polri, jelas mengundang kecurigaan publik, tetapi analisis tokoh BIN ini mampu menunjukkan momentum tersebut dari sudut pandang yang lain. Bahkan muncul semacam *enlightment* bahwa

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

kecurigaan publik tentang transparansi bisa ditampilkan dengan "wajah" lain, yang menjadi bagian dari strategi. Hal ini diperkuat oleh penjalasan tokoh KPK tentang operasi *smooth* yang banyak dicantumkan.

Dalam hal konstruksi realitas, memang potensi keberpihakan tidak dapat diabaikan. Artinya netralitas media sangat berpengaruh terhadap pembingkaian realitas tertentu dalam pemberitaan. Chairani & Kania (2013) memperkuat perihal keberpihakan dan netralitas yang dimaksud. Penelitian ini melakukan framing terhadap sosok Presiden Jokowi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi realitas *Tempo* terhadap Jokowi lebih positif dan *Gatra* cenderung netral. Perbedaan konstruksi pemberitaan tersebut dominan dipengaruhi oleh faktor ideologi dari masing-masing media.

Rahadi, (2017) lebih mempertegas perihal netralitas media dalam pemberitaan. Dalam "Pembingkaian Berita Pada Media Lokal (Analisis Framing Pemberitaan Calon Bupati Malang Pada Harian *Radar Malang* Tanggal 1-7 Oktober 2015)" dinyatakan bahwa *Radar Malang* telah mengonstruksi pemberitaan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Malang tanggal 1-7 Oktober 2015 secara tidak berimbang. Dari tiga kandidat: (1) Nurcholis dan Muhammad Mufid dari unsur independen, (2) Rendra Kresna dan M Sanusi dari koalisi Madep Mantep (PKB, NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat), (3) Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi dari PDIP, pasangan *incumbent* mendapatkan jumlah liputan lebih banyak dibanding lainnya. Jadi berdasarkan hasil penelitian, pemberitaan yang ditampilkan oleh *Radar Malang*, Rendra Kresna selaku *incumbent* diberikan *spac*e dan jumlah pemberitaan yang lebih banyak dibandingkan dengan calon pasangan yang lain.

3. Konstruksi Sosial Realitas Media Massa

Konstruksi realitas pemberitaan tidak terlepas dari proses simultan dari konstruksi sosial realitas sebagaimana konsep Berger & Luckmann (1990). Proses ini juga diakui oleh Bungin (2006) melalui koreksi dan kritiknya terhadap konstruksi sosial realitas. Pada tahapan eksternalisasi, apa yang dibangun oleh kedua media terdapat wacana-wacana yang mempengaruhi konstruksi pemberitaan. Konstruksi yang terbangun berkisar pada permasalahan upaya pelemahan KPK dari berbagai pihak termasuk dari para pebisnis. Hal ini diperkuat pula oleh keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif terhadap penguatan KPK. Fenomena yang terjadi adalah semakin melebarnya *gap* antara *das sollen* publik dengan *das sein*. Yang kemudian terjadi adalah media yang berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat sebagai konsumennya, berusaha memperkuat asumsi publik mengenai kecemasan-kecemasan yang terus meningkat. Hal ini yang kemudian melahirkan relasi pemberitaan yang lebih *marketable* berupa sinkronisasi kognisi publik dan konten pemberitaan.

Konstruksi eksternal ini seakan telah menemukan kesepahamannya atau intersubjektivitas konstruksi pemberitaan. Hal ini sayangnya kemudian semakin menemukan afirmasinya akibat perilaku pimpinan KPK yang tidak menunjukkan performanya sebagaimana harapan publik. Oleh karena itu terdapat jarak antara perencanaan, strategi dan implementasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi dengan pemikiran publik, sehingga timbul persoalan jarak yang makin melebar. Di dukung oleh konstruksi pemberitaan tentang pelanggaran kode etik dan konflik internal yang cukup berlarut-larut, maka timbul semacam ironi, bahwa KPK makin lemah menunjukkan integritasnya sebagai *hero* bagi rakyat.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Hal-hal ini kemudian diperoleh objektivasi bahwa KPK memang sedang dihadapkan pada permasalahan dukungan. Dukungan ini hanya bisa dilakukan oleh masyarakat atau khalayak pembaca/pemirsa, karena intervensi legislatif dan eksekutif sangat kuat, dari berbagai sisi. Hal ini membuat efek maklum jika KPK kemudian tampil tidak *segarang* komisioner terdahulu, bahkan cenderung membangun relasi harmoni dengan berbagai institusi yang seharusnya menjadi objek pengawasan dan tindakan.

Selanjutnya, dari sisi internalisasi, sayangnya tidak terbangun sebuah *trust* yang meningkat. Pemberitaan dugaan pelanggaran kode etik diberitakan secara masih bahkan sampai berjilid-jilid menandakan bahwa adanya kesepakatan media massa bahwa ada hal serius yang terjadi pada penguatan integritas. Meskipun dari pihak internal KPK sendiri sudah berusaha memperbaiki citra dan strategi komunikasinya, melalui berbagai aksi simpatik dan klarifikasi, tetapi upaya ini bukan menghasilkan efek kesan penguatan integritas, tetapi justru sebaliknya, KPK justru tampak sebagai lembaga yang berkinerja formal. Hal ini jelas bertolak belakang dengan kasus yang sedang dihadapi, yakni *extraordinary crime*.

Pada tahapan inilah yang coba diambil alih oleh media. Mereka berhasil mensosialisasikan kesadaran bahwa kecemasan-kecemasan publik memang perlu ditindaklanjuti dan hal ini demikian minor ditanggapi oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, konstruksi penguatan integritas KPK memang menjadi wajar disampaikan dalam bentuk pemberitaan kritis, karena ada dugaan yang menguat bahwa integritas KPK melemah bukan karena tekanan eksternal, tetapi di tingkat personal dan organisasional.

Pada tahapan objektivasi, terdapat konstruksi legitimasi, yakni melalui tanggapan oleh para pimpinan KPK sendiri, yang secara konsisten menjawab, bahwa semua wacana yang ditujukan kepada KPK tidak sepenuhnya benar. Misalnya pada asumsi pelanggaran kode etik ternyata berujung pada wacana efisiensi demikian pula soal pelemahan KPK dari berbagai kebijakan yang berujung pada perubahan wajah KPK yang lebih *smooth* dalam melakukan penindakan.

Di samping itu, di dalam objektivasi juga terjadi institusionalisasi. Hal ini terjadi pada kegiatan-kegiatan sosial yang seakan menjadi bagian dari kinerja KPK yakni upaya pencegahan korupsi melalui jalan-jalan yang lebih membumi. Dalam aksi ini misalnya ditunjukkan melalui *warning* yang dicantumkan dalam berbagai objek yang diberikan pada publik. Hal ini tidak sepenuhnya salah, tetapi terdapat efek lain di benak publik. Oleh karena aksi sosial bukan merupakan agenda yang dikehendaki oleh publik dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, sehingga aksi institusionalisasi ini juga turut menjadi penguat bahwa KPK yang ada bukan lagi hadir sebagai pemeberantas korupsi tetapi lebih pada lembaga pengawas yang dapat diklarifikasi saja.

Inilah realitas yang dibangun oleh kedua media yang dipilih sebagai objek penelitian. Adapun dilihat dari realitas yang terkonstruksi, maka terdapat perbedaan dalam durasi bahasan dan kedalam serta perluasan kedalaman. Konflik organisasional dalam satu sisi dibahas secara detil dari mantan juru bicara tetapi ada juga konstruksi yang tidak secara detil memberitakannya. Inilah konsekuensi dari konstruksi sosial media massa. Mereka mengonstruksi realitas berdasarkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang ada di dalamnya ataupun aspek manajerial yang lain. Dampak yang ditimbulkan di benak khalayak juga terdapat perbedaan-perbedaan secara rasional maupun emosional. Menyangkut soal sebaran, media *mainstream* cenderung memiliki kesempatan mengonstruksi realitas lebih merata dibanding media lain. Kedua media

(cc) BY-SA
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

yang menjadi objek penelitian ini adalah media *mainstream*, sehingga dapat dijadikan acuan opini apriori dan sinisme publik. Dari hasil *framing* Entmann sebagai peneliti kemukakan, maka dari sisi manajemen media berusaha menunjukkan adanya fungsi pengawasan, sebaliknya dari sisi publik justru apriori karena secara internal, pimpinan KPK tidak berusaha menjalin relasi simbiosis. Apa yang dilakukan KPK melalui aksi sosial simpatik tidak menciptakan efek seperti yang diharapkan karena kemasan pemberitaan media, yang menghasilkan kesan kinerja KPK yang hanya standar sebagaimana lembaga lain yang bukan antirasuah.

Massa memang terkonstruksi. Berbagai opini dan kritik publik menjadi indikator bagaimana konstruksi tersebut terjadi. Hasil konstruksi tersebut setidaknya meneguhkan bahwa ada kecerobohan pimpinan KPK dalam melaksanakan tugasnya. Pimpinan yang dimaksud seakan mengabaikan peran yang diembannya sebagai pejabat publik yang *extraordinary* pula. Mereka seharusnya menyadari bahwa pemikiran publik mengenai pelemahan KPK ini banyak didukung media, semestinya hal ini menimbulkan efek kehati-hatian personal bagi pimpinan KPK. Hal ini yang rupanya yang coba diungkan oleh media atau ditunjukkan pada publik. Jadi persoalan integritas memperkuat konstruksi realitas publik dan konstruksi realitas media, bahwa telah terjadi penurunan.

Jika disimak berdasarkan *framing* Entman, maka terjadi sebuah konstruksi moral dari pimpinan KPK yang tidak pro aktif terhadap aspirasi dan inspirasi publik. Dalam perkembangan ke depan, jika konstruksi media tidak berubah, maka dapat dimungkinkan sikap apriori publik terhadap keberadaan KPK akan semakin meningkat. Hal ini sekaligus menjadi peringatan serius kepada para pimpinan KPK untuk lebih seksama dalam membangun citra integritas.

4. Penguatan Integritas KPK

Dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan, terdapat relasi konstruksi yang saling mempengaruhi, antara konstruksi media, konstruksi publik dan konstruksi pihak internal KPK sendiri. Kunci dari semua persoalan akan bertumpu pada integritas. Sayangnya, di sisi internal KPK sendiri persoalan manajemen pengelolaan kesan ini tidak terjaga secara konsisten. Dapat ditemukan pula adanya relasi yang buruk antara KPK dan media.

Bagaimanapun relasi media tetap penting bagi lembaga KPK, tetapi relasi tersebut juga harus proporsional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu dibutuhkan pengawasan publik. Untuk meningkatkan daya pengawasan tersebut dibutuhkan literasi, antara lain literasi media dan literasi korupsi serta KPK.

Terlepas dari semuanya, patut disadari bahwa penguatan integritas KPK sangat dibutuhkan, karena harapan publik masih bertumpu pada lembaga antirasuah ini. Jika hal ini tidak diperhatikan dengan seksama oleh para pimpinan KPK dapat dimungkinkan harapan publik akan punah dan hal ini sangat membahayakan sisi pertahanan. Konstruksi ini agaknya masih belum memiliki ruang, baik pada sisi media maupun pada sisi KPK.

Konstruksi *das sein* yang harus dibangun media seharusnya banyak memuat kesadaran ini, serta kemakluman para pemangku kepentingan terhadap kritik publik, di lain sisi pihak KPK juga harus mengontruksi pemberitaan yang mencoba memenuhi harapan-harapan publik. Upaya apapun tanpa konstruksi media tentu tidak mencapai tingkat efektif, karena konstruksi media, apalagi media massa yang ekstrim demikian cepat dan merata diterima oleh publik.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penguatan integritas KPK bagaimanapun dibutuhkan pencitraan, demi menjaga konstruksi positif publik, tetapi ranah realita bagi pimpinan KPK tidak seharusnya diabaikan. Realita adalah objek konstruksi, oleh karena itu untuk penguatan integritas KPK harus dimulai dari realitas integritas itu sendiri.

KESIMPULAN

Paradigma konstruktivis, dalam strategi *framing* model Robert N. Entman telah menunjukkan secara jelas bahwa realitas memang cenderung berwajah ganda (*multiple reality*). Hal ini tidak luput dari sisi manajemen perencanaan dan strategi pemberitaan media massa yang bersangkutan. Meskipun aspek pencegahan korupsi harus diawali dari para aktor yang ada di dalam KPK sendiri, berdasarkan integritas yang dapat ditunjukkan pada publik, tetapi penguatan sebagai lembaga antirasuah tetap tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi melalui konstruksi media massa. Hal ini sebagai dampak dari konstruksi sosial media massa yang secara masif dan cepat menjangkau massa. Seandainya KPK memiliki media massa tersendiri, tetapi relasi dengan media *mainstream* tetap penting, karena *trust* massa yang sudah terbentuk cenderung apriori.

Hasil kontruksi realitas bentukan media *Kompas.com* dan *Detik.com* banyak menunjukkan kritik dan tuntutan publik terhadap Dewan Pengawas KPK mengenai dugaan pelanggaran kode etik salah satu pimpinan. Selain itu adanya konflik internal, turunnya kinerja dan pesimisme publik. Adapun perbedaannya, *Kompas.com* membangun citra positif dari aksi KPK dalam mengawasi institusi negara dan pengusutan beberapa kasus, sedangkan *Detik.com* menyampaikan konten aksi sosial simpatik, koordinasi dengan pemimpin daerah, ungkapan apresiatif terhadap eksistensi KPK dari tokoh negara populer. Di lain pihak, kedua media telah berhasil memotivasi massa untuk lebih aktif sebagai pengawas dalam menjaga integritas KPK. Pada hakikatnya ini merupakan realita yang harus terus dikembangkan, demi kelangsungan keberadaan lembaga KPK. Bagaimanapun integritas adalah konstruksi, ditinjau dari sisi komunikasi manapun..

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, kami tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, di Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Adnjani, M. D. (2009). Media Relations Sebagai Upaya Pembentuk Reputasi Organisasi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, *45*(119), 57–72. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/20

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010)* (Rev.2010). PT Rineka Cipta.

Astuti, M. (2016). Konstruksi Sosial Media Terhadap Kekuatan Personal Branding Tri Rismaharini dalam Proses Komunikasi Politik Kontemporer (Analisis Framing Pemberitaan Di Media Online Republika.co.id dan Tempo.com). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, *1*(1), 1–20. https://doi.org/10.29240/jdk.v1i1.75

Azra, A. (2017). *Korupsi dan Integritas*. Republika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/03/29/onkz36319-korupsi-dan-integritas

Berger, P. l., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES.

(cc) BY-SA
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana.

Chairani, D., & Kania, D. (2013). Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan Pelantikan Presiden Joko Widodo: Analisis Framing pada Laporan Utama Majalah TEMPO dan Majalah GATRA. *Journal Communication Spectrum : Capturing New Perspectives in Communication*, *3*(2), 121–139. http://journal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/view/1762

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, *43*(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Ilman, M. (2020). Bagi-bagi Masker Gratis, Wakil Ketua KPK: Nilai-nilai Antikorupsi Itu Peduli. *DetikNews*. https://news.detik.com/berita/d-5068873/bagi-bagi-masker-gratis-wakil-ketua-kpk-nilai-nilai-antikorupsi-itu-peduli

Juditha, C. (2013). Akurasi Berita dalam Jurnalisme Online (Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi di Portal Berita Detiknews). *Jurnal Pekommas*, *16*(3), 145–154. https://doi.org/10.30818/jpkm.2013.1160301

Mulyana, D., & Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media* (N. Huda (ed.)). LKIS Pelangi Aksara.

Rahadi. (2017). Pembingkaian Berita Pada Media Lokal (Analisis Framing Pemberitaan Calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang Tanggal 1-7 Oktober 2015). *ARISTO*, *5*(1), 49–81. https://doi.org/10.24269/ars.v5i1.401

Sitompul, P. (2014). Konstruksi Realitas Peran KPK Dalam Pemberitaan Online Terkait Kasus Korupsi (Studi Framing Beberapa Pemberitaan Online Terkait Peran KPK pada Kasus Korupsi Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, *18*(2), 169–182. https://doi.org/10.31445/jskm.2014.180203

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sukidin, B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Insan Cendekia.

Sumaryati. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Essensialisme. *Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS*, *6*(1), 1–20. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.